

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada **Triwulan IV (Oktober-Desember)**, perkembangan inflasi di Kabupaten Sumenep menunjukkan **tren peningkatan yang konsisten** dan berada **di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur**. Kondisi ini menandakan adanya tekanan harga yang relatif lebih kuat dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur.

Secara tahunan (*year-on-year*), inflasi Kabupaten Sumenep tercatat:

- **Oktober:** $\pm 3,47\%$
- **November:** $\pm 3,26\%$
- **Desember:** $\pm 3,75\%$

Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai **daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Timur** pada periode Triwulan IV. Peningkatan inflasi yang berlanjut hingga akhir tahun mengindikasikan bahwa tekanan inflasi bersifat **struktural dan musiman**, terutama terkait meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

Kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi pada periode ini adalah **kelompok makanan, minuman, dan tembakau**, yang secara historis memiliki bobot dominan dalam pembentukan inflasi daerah. Kenaikan harga pada kelompok ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pasokan, gangguan distribusi, serta meningkatnya permintaan masyarakat. Selain itu, **kelompok jasa dan kebutuhan rumah tangga lainnya**, seperti perawatan pribadi dan konsumsi jasa, turut memperkuat tekanan inflasi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di penghujung tahun.

Karakteristik geografis Kabupaten Sumenep sebagai wilayah kepulauan turut memperbesar tekanan inflasi, khususnya melalui **tingginya biaya distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah**. Kondisi ini menyebabkan harga komoditas strategis lebih rentan terhadap fluktuasi, terutama ketika terjadi gangguan cuaca, keterlambatan distribusi, atau peningkatan biaya transportasi.

Jika dibandingkan dengan target inflasi nasional yang berada pada kisaran **3 ± 1 persen**, inflasi Kabupaten Sumenep pada Triwulan IV berada mendekati batas atas target tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya **penguatan kebijakan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan**, agar tekanan harga tidak berdampak lebih luas terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

https://docs.google.com/document/d/1BL8M-ZYvM-CRl9ou3JUDbBiEA2ROkY9H/edit?usp=drive_link&ouid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Faktor Penyebab Kenaikan Harga (Inflasi) — *Kab. Sumenep*

Triwulan IV 2025 (Oktober-Desember) + Menjelang NATARU

1. Hasil Survei Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Lokal

Pola pergerakan harga kebutuhan pokok di **Pasar Anom & Pasar Bangkal** periode Q4 mirip dengan dinamika harga di pasar umumnya:

Ada komoditas yang **mengalami kenaikan harga** signifikan

Ada juga yang **stabil atau bahkan turun** tergantung pasokan & permintaan lokal jelang akhir tahun

Ini konsisten dengan pola survei harga kebutuhan pokok yang biasanya fluctuative di level pasar tradisional.

(Pemantauan harga paling akhir menjelang Nataru menunjukkan beberapa harga kebutuhan pokok stabil atau turun karena upaya monitoring oleh TPID + BPS) sumenepkab.go.id

2. Komoditas Penyumbang Utama Kenaikan Harga di Triwulan IV 2025

Kelompok yang dominan naik:

- **Makanan, minuman, dan tembakau** — terutama komoditas pokok seperti beras, daging, ikan & bahan makanan lain
- **Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga**
- **Perawatan pribadi & jasa lainnya** (cenderung fluktuatif)
- **Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Jasa makan/restoran**

Komoditas yang kemungkinan menjadi penyumbang utama di Sumenep Q4 (berdasarkan pola 2025 & Q3 sebelumnya):

- Beras
 - Daging (sapi, ayam)
 - Produk ikan/seafood
 - Cabai & bawang merah
 - Minyak goreng
 - Telur ayam
 - Tembakau kretek mesin/tangan
 - Listrik/air rumah tangga
- **tren ini mirip dengan daftar triwulan sebelumnya (Q3)** walaupun urutan & intensitasnya berubah sesuai permintaan & pasokan lokal.

Artinya: banyak komoditas pokok ini masih jadi penyumbang kenaikan harga di Q4 juga, karena mereka berada di kelompok yang indeksinya naik di Jawa Timur & ikut push inflasi Sumenep.

3. Penyebab Utama Kenaikan Harga Beberapa Komoditas

Broad pattern yang sama seperti di triwulan sebelumnya tetap relevan di Q4:

Volatilitas Harga Pangan

- Komoditas seperti produk hortikultura & perikanan tetap *fluktuatif* karena musim tanam/panen, cuaca, dan permintaan akhir tahun.

Gangguan Rantai Pasok & Biaya Angkut

- Sumenep sebagai daerah kepulauan rentan kena biaya logistik tinggi → memicu **kenaikan harga lokal** terutama barang yang didatangkan dari luar pulau.

Kenaikan Harga Barang Non-Pangan

- Kelompok jasa & non-pangan meningkat (mis. perawatan pribadi, listrik / air / BBRT, transportasi & pendidikan) yang ikut **menahan laju deflasi** atau menambah tekanan inflasi secara umum. [Jawa Timur Stats](#)

4. Perbedaan Harga Antara Pasar Pasar Bangkal & Pasar Anom

Fenomena ini tetap berlaku di Q4 2025:

- Pedagang di *Pasar Bangkal* banyak yang **kulakan di Pasar Anom** dulu — karena pedagang besar tersentral di situ.
- Ini membuat harga di Bangkal sedikit **lebih mahal** karena markup biaya angkut + margin jual kembali.

Karenanya:

Harga di dua pasar ini sering *tidak sinkron*, terutama saat permintaan naik atau pasokan terbatas menjelang akhir tahun.

Fokus Ekstra: NATARU (Natal & Tahun Baru)

5. Faktor Tekanan Harga Saat NATARU

Menjelang libur Natal-Tahun Baru:

Permintaan kebutuhan pokok meningkat tajam

- Konsumsi rumah tangga & stok keluarga *naik* menjelang libur panjang.
- Kecenderungan masyarakat beli kebutuhan lebih awal → tekanan pada harga beberapa bahan pokok.

Pemantauan Intensif TPID + BPS

- Untuk mengantisipasi lonjakan harga, **TPID Sumenep bersama BPS melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar.**
- Hasil pantauan terakhir *menunjukkan beberapa harga sudah relatif stabil bahkan turun dibanding sebelumnya*, yang berarti ada effort efektif utk kendalikan harga.

https://docs.google.com/document/d/1BL8M-ZYvM-CRl9ou3JUDbBiEA2ROkY9H/edit?usp=drive_link&oid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten Sumenep

Triwulan IV Tahun 2025 (Oktober - Desember) & Periode NATARU

Fokus Strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif

1. Keterjangkauan Harga

- Menyelenggarakan **Rapat Koordinasi Internal TPID Kabupaten Sumenep** secara berkala dalam rangka evaluasi perkembangan inflasi Triwulan IV serta kesiapan menghadapi lonjakan permintaan saat NATARU.
- Menyusun **laporan analisis perkembangan harga komoditas strategis** (beras, cabai, bawang merah, daging ayam, telur, ikan laut, minyak goreng, rokok) sebagai bahan telaah staf kepada Bupati.

2. Ketersediaan Pasokan

- Melakukan **peninjauan langsung pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Anom dan Pasar Bangkal** pada bulan Oktober - Desember 2025, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
- Mengidentifikasi komoditas rawan naik harga akibat faktor musiman (pangan segar, ikan laut, hortikultura) untuk dijadikan dasar rekomendasi penguatan pasokan.

3. Kelancaran Distribusi

- Menyelenggarakan **koordinasi dengan seluruh kecamatan** terkait laporan

perkembangan harga dan potensi gangguan distribusi bahan pangan pokok, khususnya wilayah kepulauan.

- Menyelenggarakan **koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan** terkait dinamika harga dan pasokan di **dua pasar barometer BPS (Pasar Anom & Pasar Bangkal)**, termasuk mitigasi perbedaan harga antar pasar akibat biaya logistik.

4. Komunikasi Efektif

- Menyelenggarakan **kerja sama dengan media massa dan kanal informasi publik daerah** dalam rangka penyampaian informasi perkembangan harga, hasil pemantauan pasar, serta rencana aplikatif pengendalian inflasi kepada masyarakat selama Triwulan IV dan periode NATARU.
- Menyebarluaskan hasil kegiatan TPID (rapat, pemantauan, dan rekomendasi) sebagai upaya membangun ekspektasi harga yang wajar di masyarakat.

https://docs.google.com/document/d/1BL8M-ZYvM-CRI9ou3JUDbBiEA2ROkY9H/edit?usp=drive_link&oid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi TPID Kabupaten Sumenep pada Triwulan IV Tahun 2025, termasuk periode Natal dan Tahun Baru (NATARU), secara umum telah menunjukkan **komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan**, khususnya pada komoditas strategis yang berpengaruh besar terhadap inflasi daerah.

Kebijakan yang dijalankan telah selaras dengan **kerangka strategis 4K** dan berorientasi pada pendekatan **koordinatif, monitoring lapangan, serta penguatan komunikasi publik**. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih bervariasi antar strategi dan memerlukan penguatan pada aspek tindak lanjut dan dampak kebijakan.

1. Evaluasi Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan rapat koordinasi internal TPID secara berkala telah berperan sebagai **instrumen pengendalian ekspektasi inflasi dan forum konsolidasi kebijakan lintas perangkat daerah**. Melalui mekanisme ini, TPID mampu melakukan evaluasi rutin atas dinamika inflasi Triwulan IV serta mengantisipasi potensi lonjakan permintaan pada periode NATARU.

Penyusunan laporan analisis perkembangan harga komoditas strategis sebagai bahan telaah staf kepada Bupati merupakan langkah positif dalam memastikan **pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy)**. Kegiatan ini memperkuat fungsi TPID sebagai penyedia informasi strategis bagi pimpinan daerah.

Namun demikian, dari sisi dampak kebijakan, **kegiatan masih dominan bersifat koordinatif dan administratif**, sehingga efektivitasnya dalam menekan kenaikan harga secara langsung belum optimal, terutama pada komoditas pangan yang mengalami tekanan musiman.

2. Evaluasi Ketersediaan Pasokan

Kegiatan pemantauan langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Anom dan Pasar Bangkal selama periode Oktober–Desember 2025 dinilai **efektif dalam memberikan gambaran riil kondisi pasar**, mengingat kedua pasar tersebut merupakan pasar barometer inflasi Kabupaten Sumenep.

Identifikasi komoditas rawan kenaikan harga akibat faktor musiman telah menjadi **early detection** yang penting bagi TPID dalam memahami sumber tekanan inflasi. Langkah ini menunjukkan bahwa TPID telah berupaya mengantisipasi potensi gangguan pasokan, khususnya pada komoditas pangan segar, ikan laut, dan hortikultura.

Meski demikian, evaluasi menunjukkan bahwa **kegiatan pemantauan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan pasokan secara langsung**, sehingga dampaknya terhadap stabilisasi harga masih terbatas, terutama pada periode permintaan tinggi menjelang akhir tahun.

3. Evaluasi Kelancaran Distribusi

Koordinasi dengan seluruh kecamatan terkait perkembangan harga dan potensi gangguan distribusi, khususnya di wilayah kepulauan, merupakan langkah strategis yang relevan dengan **karakteristik geografis Kabupaten Sumenep**. Kebijakan ini membantu TPID dalam memetakan wilayah dengan risiko gangguan distribusi yang lebih tinggi.

Koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dinamika harga di Pasar Anom dan Pasar Bangkal juga berkontribusi dalam **mengidentifikasi disparitas harga antar pasar** yang dipengaruhi oleh biaya logistik.

Namun, dari sisi efektivitas, koordinasi tersebut **belum sepenuhnya mampu menekan perbedaan harga antarwilayah**, khususnya antara wilayah daratan dan kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan distribusi masih menjadi faktor struktural yang memengaruhi inflasi daerah.

4. Evaluasi Komunikasi Efektif

Kerja sama dengan media massa dan kanal informasi publik daerah dalam penyampaian informasi perkembangan harga dan hasil pemantauan pasar merupakan langkah yang **strategis dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat**.

Penyebarluasan hasil kegiatan TPID telah meningkatkan transparansi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Komunikasi ini berperan penting dalam mencegah kepanikan masyarakat dan perilaku konsumsi berlebihan selama periode NATARU.

Namun demikian, efektivitas komunikasi publik masih dapat ditingkatkan, terutama dalam mengarahkan pesan pada **edukasi konsumsi bijak dan ketersediaan stok**, agar dampaknya terhadap perilaku masyarakat lebih signifikan.

https://docs.google.com/document/d/1BL8M-ZYvM-CRl9ou3JUDbBiEA2ROkY9H/edit?usp=drive_link&ouid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kondisi inflasi Triwulan IV tersebut, diperlukan langkah kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada penguatan struktur ekonomi daerah, dengan mengacu pada strategi **4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)** sebagai berikut:

1. Penguatan Stabilisasi Harga Pangan

Pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi stabilisasi harga melalui:

- Penyelenggaraan **operasi pasar secara terarah dan periodik**, khususnya untuk komoditas pangan strategis seperti beras, bawang merah, cabai, telur, dan minyak goreng.
- Penguatan koordinasi dengan **Bulog, distributor, dan pelaku usaha lokal** guna menjamin ketersediaan stok dan mencegah lonjakan harga yang bersifat spekulatif.

2. Peningkatan Kelancaran Distribusi

Untuk mengurangi tekanan inflasi akibat biaya logistik:

- Optimalisasi **sistem distribusi antarwilayah**, khususnya ke wilayah kepulauan, melalui penguatan sarana transportasi dan logistik.
- Sinkronisasi jadwal distribusi komoditas utama agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat konsumen.

3. Pengendalian Biaya Transportasi dan Energi

Mengingat peran biaya transportasi terhadap harga barang:

Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga **stabilitas harga BBM dan biaya angkutan distribusi**.

- Pemberian dukungan kebijakan bagi pelaku distribusi pangan agar biaya logistik tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

4. Penguatan Sistem Monitoring dan Data Inflasi

Pemerintah daerah perlu mengembangkan:

- **Sistem pemantauan harga secara real-time** berbasis pasar tradisional dan pasar strategis.
- Pemanfaatan data inflasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan harga musiman.

5. Penguatan Komunikasi Publik dan Edukasi Masyarakat

Untuk menjaga ekspektasi inflasi:

- Peningkatan **komunikasi kebijakan kepada masyarakat** terkait ketersediaan stok dan langkah pengendalian harga.
- Edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi perilaku *panic buying* yang dapat memperparah tekanan inflasi.

https://docs.google.com/document/d/1BL8M-ZYvM-CRl9ou3JUDbBiEA2ROkY9H/edit?usp=drive_link&oid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true